

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT  
PENGANGGURAN DI BALI**

**I Nyoman Astrayasa Putra<sup>1</sup>  
I Nyoman Mahaendra Yasa<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail:astrayasaputra@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah serta belanja modal pada pertumbuhan ekonomi, pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran, serta pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh pada tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan pada Provinsi Bali. Penelitian ini berbentuk kuantitatif serta bersifat asosiatif berbentuk hubungan kasual. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis memperlihatkan jika pendapatan asli daerah berpengaruh positif serta signifikan, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan, belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan, namun pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi secara tidak langsung pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:**pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the effect of regional income and capital expenditure on economic growth, the effect of local revenue, capital expenditure and economic growth on the unemployment rate, and regional income and capital expenditure affect the unemployment rate through economic growth. The research was conducted in Bali Province. This research is in the form of quantitative and is associative with the form of casual relationships. This study uses secondary data. The data analysis technique used in this study is path analysis techniques. Based on the results of the analysis show that regional original income has a positive and significant effect, while capital expenditure has a negative and significant effect on economic growth. Regional original income has a positive and not significant effect, capital expenditure has a negative and not significant effect, but economic growth has a positive and significant effect on the unemployment rate. Regional original income and capital expenditure do not have an indirect effect on the unemployment rate in regencies / cities in Bali Province through economic growth.

**Keywords:** regional income, capital expenditure, economic growth, unemployment rate

## PENDAHULUAN

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan (Todaro, 2000:307). Pengangguran juga bisa terjadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, dimana tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi. Pengangguran adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengangguran merupakan permasalahan yang sangat sulit dipecahkan disetiap negara maupun suatu daerah, karena pengangguran ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas yang tinggi, gejolak sosial dan politik (Yanthi, 2015).

Menurut Rahardja (2004:329), tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan, tidak mau atau belum mendapatkan pekerjaan tidak sama dengan tidak mau bekerja. Jadi yang bisa disebut pengangguran adalah seseorang yang terdaftar sebagai pencari kerja, namun belum memperoleh pekerjaan.

Pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah. Karena pengangguran disini menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensinya dengan maksimal adalah masalah pokok makro ekonomi. Arti masalah pengangguran tersebut sudah

menjadi masalah yang umum dan terjadi seluruh negara, dimana orang melakukan kegiatan perekonomian dan kegiatan yang lainnya. Masalah pengangguran juga terjadi karena tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat namun pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat (Margareni, dkk. 2016).

**Tabel 1.**  
**Tingkat Pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (%)**

a	Kab/Kot	2	2	201	201	2	Rata-rata
		013	014	5	6	017	
g	Jembrana	3,	2,	1,5	1,5	0,	2,05
	46	95	9	9	67		
	Tabanan	0,	2,	1,7	1,7	1,	1,66
	80	25	3	3	79		
	Badung	0,	0,	1,3	1,3	0,	0,89
	80	48	4	4	48		
	Gianyar	2,	1,	1,9	1,9	1,	1,71
	23	43	3	3	02		
	Klungkung	2,	1,	1,3	1,3	0,	1,55
	08	94	9	9	94		
em	Bangli	0,	0,	1,7	1,7	0,	1,07
	77	67	2	2	48		
	Karangas	1,	2,	2,1	2,1	0,	1,69
	39	06	5	5	72		
	Buleleng	2,	2,	2,0	2,0	2,	2,28
15	74	4	4	41			
Denpasar	2,	2,	3,5	3,5	2,	2,95	
72	32	4	4	63			
<b>Provinsi</b>	<b>1,</b>	<b>1,</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,</b>	<b>1,87</b>	
<b>Bali</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>48</b>		

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 1. menunjukkan adanya disparitas terhadap tingkat pengangguran antar wilayah di Provinsi Bali, dimana selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017, rata-rata tingkat pengangguran tertinggi disandang oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,95 persen dan selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, yaitu masing-masing sebesar 2,28 persen dan 2,05 persen. Angka pengangguran yang terendah disandang oleh Kabupaten Badung dan diikuti oleh Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung, yaitu masing-masing sebesar 0,89 persen, 1,07 persen dan 1,55 persen.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Perekonomian yang tumbuh dan berkembang tidak bisa lepas dari peran pemerintah melalui upaya-upaya yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang baik (Edogbanya, 2013). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keadaan perekonomian dan kemakmuran masyarakat baik dalam suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi juga adalah suatu proses meningkatnya pendapatan nasional seiring waktu merupakan indikator penting guna mengukur berhasilnya pembangunan negara. Keberhasilan pembangunan yang dicapai akan berguna dalam menentukan pembangunan dimasa yang akan datang (Taufik, dkk. 2014). Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan erat pada proses meningkatnya produksi barang serta jasa pada kegiatan ekonomi masyarakat (Laksmi, 2013). Namun, Kaur (2016) menyatakan pertumbuhan ekonomi terpengaruh oleh perkembangan teknologi serta pengetahuan tidak hanya di atas faktor fisik, sehingga perlu juga dilakukan peningkatan ilmu pengetahuan guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi skala nasional ataupun skala daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan suatu perekonomian di suatu daerah yang dihasilkan dari seluruh aktifitas sektor-sektor ekonomi daerah, baik dalam bentuk barang dan jasa yang merupakan gambaran keadaan perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana

aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Rustariyuni, 2014). Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikatakan meningkat jika terjadi kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Dalam proses pertumbuhan pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah (Dalamagas, 2010). Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan standar hidup masyarakat pada ciri peningkatan kemampuan produksi barang serta jasa, kemudian disebutkan jika suatu produktivitas tergantung dengan modal fisik, manusia, sumber daya alam serta pengetahuan teknologi Mankiw (2006:61). Pertumbuhan ekonomi tinggi akan menciptakan lapangan pekerjaan dan akan menyerap tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan akan menurunkan pengangguran (Seran, 2017), dengan membaiknya suatu pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mengakibatkan terjadinya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran akan semakin menurun karena pertumbuhan ekonomi lebih berorientasi kepada sistem produksi padat karya. Pertumbuhan ekonomi dapat memberikan peluang kepada industri untuk meningkatkan produksi yang

berdampak terhadap peningkatan penggunaan tenaga kerja (Mentari, 2016). Beberapa ekonom percayamengenai pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, atau mengurangi tingkat pengangguran, dikarenakan permintaan akan tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh satu unit tenaga kerja (Safrida, 1999). Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan bahwa bagaimana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Selain itu PDRB yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di daerah tersebut, karena dengan naiknya PDRB dapat meningkatkan kapasitas produksi yang dilakukan (Ryan, dkk. 2017).

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dalam mengelola serta memaksimalkan sumber-sumber daya yang ada dalam suatu daerah yang dilakukan oleh masyarakat yang membentuk kerjasama dengan pemerintah daerah maupun sektor swasta untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara terus-menerus serta berkelanjutan. Proses berkelanjutan dan menuju perbaikan menjadi landasan suatu daerah untuk melaksanakan pembangunan (Suartha, 2017). Pembangunan daerah di Provinsi Bali merupakan salah satu dari pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik secara fisik maupun mental yang bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat serta memperkuat kepribadian dan jati diri masyarakat baik lokal, regional maupun nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut

pemerintah daerah bersama-sama mengambil langkah dalam pembangunan daerah (Permana, 2014). Kebijakan dan kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat saat ini berfokus utama dalam ketimpangan antar daerah (Irawan, 2015). Tingkat ketimpangan antar daerah ini ialah sebuah proses tumbuh pada seluruh negara serta tidak mengidentifikasi pada model pembangunan satu (Antonescu, 2010). Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Yasa, 2015). Sehingga pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (Akudugu, 2012).

Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2012:73). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Inuwa (2012), menyebutkan pengeluaran pemerintah ialah salah satu instrument penting guna mengontrol perekonomian. Kinerja keuangan bisa dipengaruhi dengan komponen-komponen terdapat pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) dan terdiri atas pendapatan serta belanja daerah. Pada sekian banyak komponen yang ada pada laporan APBD disebutkan jika kinerja keuangan bisaterpengaruh dengan belanja modal serta pendapatan asli daerah, diartikankian

banyak belanja modal kian tinggi juga produktivitas perekonomian, pada hal ini ialah kinerja keuangan pemerintah (Wardana, 2014). Pengeluaran pemerintah hendaknya digunakan dengan tepat sasaran (Salih 2012). Andirfa (2016) menyebutkan jika tersedianya infrastruktur baik serta mendukung bisa menciptakan efisiensi pada berbagai sektor serta produktivitas masyarakat jadi kian tinggi serta dengan terciptanya efisiensi tersebut akan dapat terjadinya peningkatan pertumbuhan kesejahteraan.

Alokasi anggaran belanja modal yang tinggi juga diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran apabila pelaksanaan yang sudah direncanakan mencapai target yang sudah dianggarkan (Ogujiuba, 2014). Belanja modal pemerintah pada pelaksanaan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat menambah penyerapan tenaga kerja, berarti pengangguran bisa menurun, lebih banyak masyarakat bekerja serta mempunyai penghasilan, kemudian bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Arini, 2016). Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran (Zakaria, 2015). Pertumbuhan kesejahteraan itu memiliki hubungan pada kinerja keuangan, sejalan pada pernyataan Halim (2012:126), gambaran kemandirian daerah pada otonomi bisa diketahui dengan seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan pada daerah itu guna bisa membangun daerahnya, serta guna bersaing secara sehat pada daerah lainnya guna mencapai otonomi yang sebenarnya.

Otonomi daerah atau yang dikatakan sebagai desentralisasi fiskal mewajibkan pemerintah daerah serta masyarakat serempak membangun daerahnya. Desentralisasi fiskal membuat kebebasan pada pemerintah daerah guna mengatur

daerahnya dan membuat kebijakan guna bisa menunjang potensi pada daerahnya. Pembentukan desentralisasi fiskal memiliki tujuannya menaikkan serta meratakan kesejahteraan, dan kemandirian daerah dalam pengelolaan daerah serta meminimalisir subsidi pemerintah, dan melaksanakan pembangunan daerah dengan merata. Ketika berlakunya desentralisasi fiskal seluruh daerah yang ada pada Indonesia berlanjut melaksanakan pembangunan serta membangun kebijakan guna bisa menambah pembangunan pada daerah.

Desentralisasi fiskal memberi kewenangan kepada daerah pada semua bidang pemerintahan namun tidak untuk politik luar negeri, pertahanan serta keamanan, kebijakan fiskal serta moneter, agama (Suparmoko, 2002:17). Desentralisasi diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita agar lebih tinggi, serta bisa meningkatkan potensi guna mengurangi kemiskinan (Miranti *et al.*, 2014). Kebijakan otonomi tercermin pada wewenang daerah mengatur keuangan serta pemanfaatan sumber daya daerah, dan juga tercermin pada keterbukaan ekonomi daerah itu (Fajrii, dkk. 2016). Ada beberapa faktor pada keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal, ialah sumber daya manusia memiliki kualitasnya untuk melakukan kebijakan serta sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Keuangan daerah pengelolaannya bagus, serta bisa menggali sumber pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan seperti pada peraturan berlaku. Teknologi tersedia, pada pelaksanaan desentralisasi fiskal perlu membutuhkan teknologi mumpuni supaya menunjang dilaksanakannya kebijakan serta peraturan yang ada. Manajemen yang bagus pada pengelolaan daerah dan melaksanakan kebijakan seperti pada peraturan berlangsung. Sehingga,

terdapatnya otonomi itu peran pemerintah pada pembangunan suatu daerah sangat penting (Nurudeen, 2010).

Pendapatan asli daerah adalah sebuah indikator pada kemandirian otonomi daerah guna mencari potensi dalam peningkatan sumber penerimaan. Kian banyak pendapatan asli daerah, kemudian kian mandiri daerah saat membuat keputusan serta kebijakan pembangunan. Tingginya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah pada pertumbuhan ekonomi daerah harusnya adalah suatu peluang yang bisa dipergunakan dengan optimal guna memacu perekonomian daerah. Pendapatan asli daerah sangat bergantung dengan jumlah serta berbagai macam objek pajak ataupun retribusi daerah. Pemerintah tiap daerah memiliki kebebasan saat memutuskan tarif pajak ataupun retribusi daerahnya serta berpedoman pada undang-undang untuk batas maksimum pada tarif pajak serta retribusi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari serta menemukan potensi-potensi pada daerahnya.

Perekonomian suatu daerah bergantung pada pajak daerah serta retribusi daerah. Dan bila pajak daerah serta retribusi daerah naik kemudian ekonomi daerah itu kian tinggi. Tingginya dari pendapatan yang dapat diterima oleh pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah yang ada diterima oleh pemerintah daerah, dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah akan membuat perekonomian bergerak ke arah yang dinamis, sehingga akan menarik minat dari pelaku usaha melakukan investasi yang berdampak pada penambahan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada dan pengangguran akan semakin menurun

(Walalangi, dkk. 2017). Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan pada pengangguran dapat dilihat dari pendapatan asli daerah sebagai cermin dari produktivitas dan pendapatan akibat kemunculan usaha baru (ekstensifikasi) atau pula dapat terjadi ada perkembangan secara intensifikasi yang menyerap banyak tenaga kerja (Santosa, 2013).

Menurut Rori dkk. (2016), bahwa peningkatan pendapatan asli daerah akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat akan jelas terlihat, karena peningkatan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan tingkat pengangguran akan menurun dari peningkatan sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi (Priambodo, 2015).

Menurut Hendarmin (2012), bahwa belanja modal umumnya dialokasikan guna membangun sarana serta prasarana seperti peralatan, infrastruktur, lapangan pekerjaan dan yang lainnya, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian. Peningkatan dari pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran (Zulfa, 2016).

Pemerintah daerah harus bisa menekan tingkat pengangguran yang terdapat di kabupaten/kota Provinsi Bali melalui upaya-upaya kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah dan juga harus mampu memanfaatkan pendapatan daerah dan belanja yang dilakukan pemerintah daerah agar tingkat pengangguran disini dapat menurun.

Tujuan pada penelitian yaitu:

- 1) Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah serta belanja modal pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal serta pertumbuhan ekonomi pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah serta belanja modal pada tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Konsep dari penelitian, menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah serta belanja modal pada pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran pada kabupaten/kota Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah mencerminkan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah seperti banyaknya penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan penduduk menjadi meningkat dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan meningkat juga. Hal ini menandakan pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pernyataan ini didukung oleh penelitian Mawarni (2013) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berdampak signifikan dan positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kusuma (2016) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suwandika (2015) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negatif pada Tingkat Pengangguran. Hubungan negatif terdapat diantara variabel pendapatan asli daerah pada tingkat pengangguran yang didapatkan pada penelitian didukung penelitian Santosa (2013), menyimpulkan jika hasil pada penelitiannya diperjelas jika variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh dengan turunannya yaitu tingkat pengangguran pada daerah. Berarti, peningkatan pendapatan asli daerah bisa membuat tumbuh usaha-usaha baru guna bisa menyerap tenaga kerja, kemudian bisa merendahkan serta menekan tingkat pengangguran.

Pengeluaran Pemerintah ialah salah satu kebijakan fiskal, adalah sebuah tindakan pemerintah guna mengatur jalannya perekonomian melalui cara penentuan besarnya penerimaan serta pengeluaran pemerintah tiap tahun, dilihat pada dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) nasional serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah dan regional. Kebijakan fiskal bertujuan guna menstabilkan harga, tingkat output, ataupun kesempatan kerja serta memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja publik sebagian besar dikendalikan oleh pertumbuhan ekonomi (Akonji *et al.* 2013).

Penelitian Halim (2007:256) menyebutkan pengeluaran pemerintah ialah salah satunya belanja modal, mempunyai arti pengeluaran anggaran guna mendapatkan aset tetap serta aset lainnya dan mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tanah, belanja peralatan serta mesin, belanja modal gedung serta bangunan, belanja modal jalan, irigasi, serta jaringan, belanja

aset tetap lainnya, kemudian belanja aset lainnya merupakan bagian dari belanja modal. Nworji *et al.* (2012), menyimpulkan bahwa pengalokasian belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Chinweoke *et al.* (2014) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Todaro (2006:223) menyebutkan terdapat beberapa faktor serta komponen utama pada pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal mencakup seluruh bentuk serta jenis investasi baru kemudian ditanamkan pada tanah, peralatan fisik serta sumber daya manusia. Peningkatan penduduk yang beberapa tahun kedepan sendirinya memberikan peningkatan angkatan kerja. Kemajuan teknologi. Aset tetap dipunyai hasil dilakukannya belanja modal adalah prasyarat utama guna memberi pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Guna meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dengan bentuk anggaran belanja modal pada APBD. Alokasi belanja modal tersebut berdasar pada kebutuhan daerah untuk sarana serta prasarana, baik guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun guna fasilitas publik.

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bisa dicapai suatu daerah bila daerah itu selalu dapat membenahi infrastruktur pada daerahnya. Belanja modal dilaksanakan guna memperoleh aset tetap pemerintah daerah, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, serta harta tetap lain. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan bisa mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan gilirannya bisa memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu peningkatan belanja modal diharapkan bisa menjadi faktor

pendorong timbulnya berbagai investasi baru pada daerah guna mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya kemudian akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin atau keserasian belanjanya rendah (Abimanyu, 2005:112). Halim (2002:73) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Apabila proporsi belanja modal lebih besar dari belanja rutin, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan efektif sehingga fasilitas pelayanan publik kepada masyarakatpun meningkat dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran yang terjadi di masyarakat. Kresnandra (2013) mengatakan bahwa dalam penelitain yang dilakukannya bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran.

Menurut Todaro (1985:219), pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Rahmadin (2013) mengatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukannya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Mengoptimalkan dan mengelola pendapatan asli daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya akan berdampak kepada penekanan

tingkat pengangguran, dibutuhkan pengelolaan alokasi anggaran untuk salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran dapat mendorong serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi alat menurunkan pengangguran (Kuncoro, 2004:87). Pengangguran disini memiliki kaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan pekerjaan berhubungan pada belanja pembangunan. Kemudian, strategi pengoptimalan serta pengelolaan anggaran bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi dari sektor pembangunan serta pertumbuhan ekonomi disini dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah (Setiyawati, 2007).

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan guna membangun sarana serta prasarana kemudian diharapkan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi. Fasoranti (2012), menyatakan bahwa untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mampu mengendalikan pengeluaran langsung yang dilakukakannya. Pengeluaran yang secara terus menerus dilakukan hanya akan menyebabkan ketimpangan menjadi semakin tinggi, karena hanya kalangan tertentu saja yang akan menikmatikannya, namun jika sebaliknya pengeluaran pembangunan yang mempunyai proporsi yang lebih besar akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pada kesempatan kerja pada tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan dan akan mengurangi tingkat pengangguran (Suwandika, 2015).

Berdasarkan kajian pustaka dan rumusan masalah maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

- 1) Pendapatan asli daerah serta belanja modal memiliki pengaruh positif serta signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Pendapatan asli daerah, belanja modal serta pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif serta signifikan pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Pendapatan asli daerah serta belanja modal memiliki pengaruh signifikan pada tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

#### **METODOLOGI PENULISAN**

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan bentuk hubungan kasual. Lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten/kota Provinsi Bali memakai data yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas terkait pada obyek penelitian. Penelitian ini focus pada kajian empat variabel utama ialah pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pada penelitian ini yang merupakan variabel bebas ialah variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) dan Belanja Modal ( $X_2$ ). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel Tingkat Pengangguran ( $Y_2$ ). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi serta tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data sekunder yang dipakai oleh peneliti yaitu adalah tingkat pengangguran, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di

kabupaten/kota Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan cara observasi non partisipan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (*Path Analysis*). Uji normalitas adalah suatu pengujian untuk menguji apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas, uji yang digunakan salah satunya adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S), data dikatakan berdistribusi normal bila nilai signifikansi diatas 0,05. Uji autokorelasi adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2016:107). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan pengujian dengan uji *Durbin-Watson* (DW Test). Apabila hasil yang didapat nilai *Durbin-Watson* berada di antara nilai  $d_u$  dan  $4-d_u$  maka tidak ditemukan gejala autokorelasi. Uji sobel atau uji pengaruh tidak langsung ialah cara guna menguji kekuatan pengaruh tak langsung antar variabel *independent* (X) pada variabel *dependent* ( $Y_2$ ) melalui variabel *intervening* ( $Y_1$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2.**  
**Hasil Coefficients Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.41873	0.144825		44.32047	,000
PAD	0.00089	0.00031	1,463	2.871407	,006
BM	0.002529	0.001069	-1,205	-2.366198	,022

Sumber: Data diolah, 2018

Pendapatan asli daerah pada nilai sig. 0,006 < 0,05 memperlihatkan jika pendapatan asli daerah mempengaruhi secara signifikan serta mempunyai pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Belanja modal pada nilai sig. 0,022 < 0,05 memperlihatkan jika belanja modal berpengaruh signifikan serta memiliki pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 3.**  
**Hasil *Coefficients* Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0.313399	1.257391		-0.249245	,804
PAD	0.00045	0.000461	,523	0.976335	,334
BM	-0.002664	0.001555	-,896	1.712924	,093
EG	0.412579	0.193399	,291	2.133301	,038

Sumber: Data diolah, 2018

Pendapatan asli daerah dengan nilai sig. 0,334 > 0,05 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Belanja modal dengan nilai sig. 0,093 > 0,05 menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dengan nilai sig. 0,038 < 0,05 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran.

Koefisien jalur bisa dibangun dengan membentuk diagram jalur. Model itu bisa dinyatakan dengan persamaan struktural, ialah:

1) Persamaan Struktural 1

$$Y_1 = 1,463 X_1 - 1,205 X_2 + e_1$$

2) Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = 0,523 X_1 - 0,896 X_2 + 0,291Y_1 + e_2$$

Tabel 4. menjelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ), Variabel belanja modal ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ). Variabel jumlah pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran ( $Y_2$ ), Variabel belanja modal ( $X_2$ ) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran ( $Y_2$ ), Variabel pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran ( $Y_2$ ).

**Tabel 4.**  
**Ringkasan Koefisien Jalur**

Regresi	Koef. Regresi Standar	Standar Error	t hitung	p value	Keterangan
$X_1 - Y_1$	1,463	0,000310	2,871407	0,006	Signifikan
$X_2 - Y_1$	-1,205	0,001069	-2,366198	0,022	Signifikan
$X_1 - Y_2$	0,523	0,000450	0,976335	0,334	Tidak signifikan
$X_2 - Y_2$	-0,896	0,002664	-1,712924	0,093	Tidak signifikan
$Y_1 - Y_2$	0,291	0,193399	2,133301	0,038	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2018

Pengaruh langsung variabel  $X_1$  terhadap variabel  $Y_1$  yang di perlihatkan pada tabel 5 ialah 1,463. Tidak ada pengaruh tak langsung, kemudian pengaruh totalnya ialah 1,463. Pengaruh langsung variabel  $X_1$  pada  $Y_2$  ialah 0,523. Pengaruh tak langsung  $X_1$  pada  $Y_2$  melalui  $Y_1$  didapat dari  $1,463 \times 0,291 = 0,426$ . Sehingga, pengaruh total  $X_1$  pada  $Y_2$  melalui  $Y_1$  ialah senilai  $0,523 + 0,426 = 0,949$ . Pengaruh langsung variabel  $X_2$  pada variabel  $Y_1$  ialah -1,205. Tidak ada pengaruh tak langsung, sehingga pengaruh totalnya yaitu -1,205. Pengaruh langsung variabel  $X_2$  pada  $Y_2$  ialah -0,896. Pengaruh tak langsung  $X_2$  pada  $Y_2$  melalui  $Y_1$

didapatkan dari  $-1,205 \times 0,291 = -0,350$ . Sehingga, pengaruh total  $X_2$  pada  $Y_2$  melalui  $Y_1$  ialah senilai  $0,896 - 0,350 = -1,246$ .

**Tabel 5.**  
**Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Total Pengaruh Antar Variabel Penelitian**

Variabel	$X_1$			$X_2$		
	PL	PTL	TP	PL	PTL	TP
$Y_1$	1,463	-	1,463	-1,205	-	-1,205
$Y_2$	0,523	0,426	0,949	-0,896	-0,350	-1,246

Sumber: Data diolah, 2018

Untuk mendapatkan nilai  $e_1$  yang memperlihatkan jumlah *variance* variabel pendapatan asli daerah yang belum dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah serta belanja modal dihitung memakai rumus.

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,178} = 0,906$$

Sedangkan guna mendapatkan nilai  $e_2$  yang memperlihatkan *variance* variabel kesejahteraan masyarakat yang belum dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi maka dihitung menggunakan rumus.

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,234} = 0,875$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut.

$$R^2_m = 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2$$

$$R^2_m = 1 - (0,906)^2 - (0,875)^2$$

$$R^2_m = 0,373$$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 37,3 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 37,3 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 62,7 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pada Tabel 6. Diperlihatkan jika nilai *Kolmogorov Smirnov* (K-S) senilai 0,061, kemudian nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0,200. Hasil itu memperlihatkan jika model persamaan regresi itu memiliki distribusi normal pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* diatas nilai *alpha* 0,05.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Normalitas Struktur 1**

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,50112661
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,061
	Negative	-,038
Test Statistic		,061
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 7. dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* (K-S) sebesar 0,078, sedangkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari nilai *alpha* 0,05.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Normalitas Struktur 2**

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,68531095
Mo	Absolute	,078

st Extreme Differences	Positive	,075
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah, 2018

Persamaan regresi pada Tabel 8.dibawah memeperlihatkanjika nilai *Durbin-Watson* senilai 1,965. Pada tingkat signifikansi 5%, nilai dl = 1,485 serta du = 1,683. Sehingga hasil uji autokorelasi pada kriteria  $du < DW < 4-du$  ialah  $1,680 < 1,965 < 2,317$ . Bisa diperlihatkanjika model regresi yang dipakai tidak terdapat gejala autokorelasi.

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji Autokorelasi Struktur 1**

Mod el	R	Adjusted R		Change Statistics					Durbin- Watson	
		Square	Square	Std. Error	R Square	F	df1	df2		Sig. F
1	,421 <sup>a</sup>	,178	,145	,51086	,178	5,506	2	51	,007	1,965

Sumber: Data diolah, 2018

Persamaan regresi pada Tabel 9. memperlihatkanjika nilai *Durbin-Watson* senilai 1,136. Pada tingkat signifikansi 5%, nilai dl = 1,446 serta du = 1,680. Sehingga hasil uji autokorelasi pada kriteria  $du < DW < 4-du$  ialah  $1,680 > 1,136 < 2,320$ . Bisa diperlihatkanjika model regresi yang dipakaiterdapat gejala autokorelasi.

**Tabel 9.**  
**Hasil Uji Autokorelasi Struktur 2**

Mod el	R	Adjusted		Change Statistics					Durbin- Watson	
		Square	R Square	Std. Error	R Square	F	df1	df2		Sig. F
1	,483 <sup>a</sup>	,234	,188	,70557	,234	5,081	3	50	,004	1,136

Sumber: Data diolah, 2018

Nilai *standardized coefficient beta* senilai 0,634 serta nilai probabilitas senilai  $0,006 < 0,05$  jadi  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima, kemudian diartikan pendapatan asli daerah mempengaruhi positif serta signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Nilai *standardized coefficient beta* senilai -1,205 serta nilai probabilitas

senilai  $0,022 < 0,05$  jadi  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima, kemudian diartikan belanja modal mempengaruhi negatif serta signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Nilai *standardized coefficient beta* senilai  $0,523$  serta nilai probabilitas senilai  $0,334 > 0,05$  jadi  $H_0$  diterima serta  $H_1$  ditolak, kemudian diartikan pendapatan asli daerah mempengaruhi positif serta tidak signifikan pada tingkat pengangguran.

Nilai *standardized coefficient beta* senilai  $-0,896$  serta nilai probabilitas senilai  $0,093 > 0,05$  jadi  $H_0$  diterima serta  $H_1$  ditolak, kemudian diartikan belanja modal mempengaruhi negatif serta tidak signifikan pada tingkat pengangguran. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar  $0,291$  dan nilai probabilitas sebesar  $0,038 < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah serta belanja modal tidak berpengaruh signifikan pada tingkat pengangguran sehingga perhitungan uji pengaruh tidak langsung tidak dilakukan dalam penelitian ini.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah mempengaruhi positif serta signifikan, serta belanja modal mempengaruhi negatif serta signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif serta tidak signifikan, belanja modal mempengaruhi negatif serta tidak signifikan, namun pertumbuhan ekonomi mempengaruhi positif serta signifikan pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah serta belanja modal tidak berpengaruh secara tidak

langsung pada tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi.

Saran dari penelitian ini adalah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam penerimaan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah agar ditingkatkan lagi peranan dalam alokasi pendapatan daerah tersebut, agar pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali bisa lebih meningkat. Kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali agar pengalokasian belanja modal yang sesuai dengan sasaran, yaitu diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan ke daerah produksi atau penyediaan tenaga kerja yang dapat memberikan dampak *multiplier effect* terhadap perekonomian masyarakat. Kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali agar pendapatan daerah disetiap masing-masing daerah agar dialokasikan dengan tepat dan didistribusikan terhadap potensi dan sumber daya yang ada disetiap masing-masing daerah, sehingga dari pemanfaatan potensi dan sumber daya disetiap daerah, maka akan muncul usaha-usaha baru yang akan menggunakan tenaga kerja dan tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali akan menurun. Kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan belum sesuainya realisasi anggaran belanja modal yang dilakukan masing-masing pemerintah daerah, maka pemerintah daerah disini agar merealisasikan anggaran belanja modal dengan perbaikan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur dengan sesuai sasaran, sehingga anggaran belanja modal yang tepat digelontorkan akan mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nantinya dan membuka

kesempatan kerja sehingga akan memberikan dampak pada penurunan tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. Kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali agar investasinya tidak cenderung berorientasi pada sektor padat modal dibandingkan dengan sektor padat karya. Pemerintah daerah disini memiliki peranan agar dapat mendorong tumbuhnya investasi padat karya, sehingga semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap maka akan menurunkan tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali.

## REFERENSI

- Abimanyu, Anggito. (2005). *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Jakarta. Bapekki Depkeu.
- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., and Wakilia, A. M. (2013). Nexus Between Publik Expenditure and Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*, 2(4), 2383-2395.
- Akudugu, Jonas Ayaribilla. (2012). *Accountability in local Government revenue management: who does what?*. *Journal of Sustainable Development*, 2(8), 22-32.
- Andirfa, Mulia. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. *Tesis*. Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.
- Antonescu, Daniela. (2010). The Analysis of Regional Disparities in Romanias withs Ginis/Strucks Coefficient of Concentrations. *Scientific Researcher*, 2(40),161-183.
- Arini S. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Petumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB*, 2(2), 33-50.
- Chinweoke, N., Ray, N., & Paschal, N. O. (2014). Impacts of Governments Expenditures ons Nigerias Economics Growths (1992-2011). *The Macrotheme Review*, 3(7), 79-87.
- Dalamagas, Basil. (2010). Publics Sectors& Economics Growths: The Greeks Experiences. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32(3), 277-288.

- Edogbanya, Adejoh. (2013). Revenues Generations: Impacts on Governments Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *Global Journal of Management and Business Research*, 13(4),12-26.
- Fajrii, Muhammad, Arman Delis & Yohanes Vyn Amzar. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 99-107.
- Fasoranti, Mary Modupe. (2012). The Effects of Governments Expenditures on Infrastructures on the Growths of the Nigerias Economys, 1997-2009. *Internationals Journal of Economic & Financial Issues*, 2(4), 513-518.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendarmin. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal EKSOS*, 8(3), 144-155.
- Inuwa, Nasiru. (2012). Governments Expenditures& Economics Growths in Nigeria: Cointegrations Analysis & Causality Testings. *Academic Research International*, 2(3), 718-723.
- Irawan, Andi. (2015). Regionals Incomes Disparitie in Indonesia: Measurement, Convergences Procces, & Decentralisations. *Bulletins of Indonesian Economics Studie*, 51(1), 148-149.
- Kaur, Masjinder. (2016). Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 8(2), 205-212
- Kresnandra, Ngurah Agung & Adi Erawati. (2013). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat pengangguran dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 544-560.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1-11.
- Laksmi, Dewi Sakita & Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2013). Pengaruh PAD, PMA, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(11), 502-512.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama, I Ketut Djayastra dan Murjana Yasa. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *PIRAMIDA UNUD*, 12(1), 101-110.
- Mawarni, Darwanis & Abdullah, Syukriy. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syah Kuala, 2(2), 80-90.
- Mentari, Ni Wayan dan Mahaendra Yasa. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Udayana, Bali, 5(6), 692-712.
- Miranti, Riyana., Rebecca Cassells&Alan Duncan (2014). Revisiting the Impacts of Consumptions Growths and Inequality on Poverty in Indonesia during s Decentralisations. *Bulletin of Indonesian Economic Studie*, 50(3), 461-482.
- Nurudeen, A., & Usman, A. (2010). Governments Expenditures& Economics Growths in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregates Analysis. *Business and Economics Journals*, 4, 1-11.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Tomothy C, O., and Nworji. L. O. (2012). Effects of Publik Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Science and Business Research*, 1(7), 1-15.
- Ogujiuba K. (2014). Capital Budget Implementation in Nigeria: Evidence from the 2012 Capital Budget. *Contemporary Economic*, 8(2), 299-314.
- Permana, I Gusti Agung Bagus Ari Surya. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja melalui Investasi Di Provinsi Bali Tahun 1993-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(4), 230 – 242.

- Priambodo, Agung. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 1-9.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. (2004). *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Rahmadin, Abubakar Hamzah dan M. Nasir. (2013). Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 59-66.
- Rori, Chindy Febry, Antonius Y Luntungan dan Audie O Niode. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Perumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (2), 243-254.
- Rustariyuni, Surya Dewi. (2014). Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan per kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA UNUD*, 10(1), 45-55.
- Ryan Z, R. Achmad, Nanik Istiyani dan Anifatul Hanim. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur. *E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 187-191.
- Safrida. (1999). Dampak Kebijakan Upah Minimu dan Makroekonomi Terhadap Laju Inflasi, Kesempatan Kerja serta Keragaan Permintaan dan Penawaran Agregat. *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. (2012). The Relationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidance from Sunda. *International Business Research*, 5(8), 40-46.
- Santosa, Budi. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2),130-143.
- Seran, Sirilius. (2017). Hbungan Anttara Pendiidikan, Pengangguran & Pertumbuhan Ekonomi Dngan Kemiiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuanttitatif Terapan*, 10(1), 59-71.
- Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.

- Suartha, Nyoman & Murjana Yasa. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 95-107.
- Suwandika, Eka dan Mahaendra Yasa. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E- Jurnal EP Unud* 4(7), 794-810.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Taufik, Muhammad, Eny Rochaida dan Fitriadi. (2014). Pengaruh Investasi dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 90-101.
- Todaro, Michael P. (1985). *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang, Buku 1*. Jakarta: Akademika Presindo.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Walalangi, Stasya, Rosalina A.M. Koleangan dan Hanly F.DJ. Siwu. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(1), 171-182.
- Wardana, Ranga. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap PDRB (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat.
- Yanthi, Cokorda Istri Dian Purnama dan Marhaeni. (2015). Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *PIRAMIDA UNUD*, 10(2), 68-75.
- Yasa, I Komang Oka Artana & Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi & Disparitas Pendapatan antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 63-71.
- Zakaria. (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Pontianak. *Jurnal Curvanomic*, 4(4), 52-64.
- Zulfa, Andria. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(1), 13-22.